

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana satu Bidang Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Reza

NPM : 177310693

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Reza
NPM : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sus bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferehensif

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.Ip


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Reza
NPM : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim pengujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Maret 2022


Ketua


Syarifrianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris


Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Anggota


Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 064 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Reza
N P M : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerincci Kabupaten Pelalawan.

Struktur Tim :

1. Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rijalul Fikri, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Maret 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

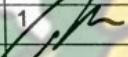
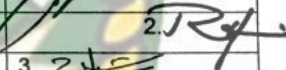
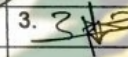
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 067 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 10 Maret 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Reza
NPM : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.*

Nilai Ujian : Angka : " 85,3 " : Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.A	Sekretaris	2. 
3.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4. X

Pekanbaru, 10 Mare 2022
Ap. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Reza
NPM : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Ketua

Sekretaris


Syaprianto, S.Sos., M.IP


Rijalul Fikri, S.Sos., MA


Turut Menyetujui

Mengetahui
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Yang maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga Allah SWT. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan orang-orang yang istiqomah dijalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari berapa pihak Selama proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau; yang menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan pada penulis ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto S.Sos., M.IP, selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermafaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi dari awal hingga selesai.
7. Terimakasih kepada ayahanda “Idris” dan ibunda “Hesty” yang selalu memberikan doa dan dorongan moril dan materi kepa penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anaknya agar lebih baik.
8. Terima kasih kepada abang “Zulfaijar” dan adik-adik “Ginda”, “Angga”, dan “Shania” yang selalu memberikan doa dan dorongan secara moril dan materi kepada penulis , memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib adiknya sekaligus kakak yang lebih baik lagi.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan angkatan 2017 , seperjuangan memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penulis ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Reza



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Kegunaan	23
1. Tujuan Penelitian	23
2. Kegunaan Penelitian	24
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	26

1. Konsep Pemerintahan.....	26
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	30
3. Konsep Peranan.....	31
4. Konsep Kebijakan.....	36
5. Konsep Pengelolaan Sampah.....	40
6. Konsep Sampah.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Konsep Operasional.....	52
E. Operasional Variabel.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Informan Penelitian.....	58
E. Teknik Penentuan Informan.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	61
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	63
B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	66
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	69

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	76
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah DiKecamatan Pangkalan Kerinci	77
1. Norma	77
2. Individu dalam Organisasi	81
3. Individu dalam Masyarakat	85
C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan kerinci	89
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR ISI TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Daftar Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2021	12
Tabel I.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	16
Tabel I.3 Volume Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2021	19
Tabel II.1 Peneliti Terdahulu	47
Table II.2 Konsep Operasional Variabel.....	54
Tabel III.1 Informan Penelitian	58
Table III.2 Jadwal kegiatan penelitian Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	61
Table IV.I Pembagian Luas Wilayah.....	65
Table IV.II Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	66
Tabel IV.III Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan.....	67
Tabel IV.IV Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	68
Table V.I Identitas Informan	76

DAFTAR ISI GAMBAR

Halaman

Gambar I.I Mekanisme Pengangkutan Sampah.....	20
Gambar II.I Kerangka Pikir.....	51
Gambar IV.I Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	75



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza
NPM : 177310693
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Pelaku Pernyataan,



5000
RIBU RUPIAH

Reza

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN**

ABSTRAK

Reza

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci serta factor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah Kualitatif yang mana informan berasal dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Pelalawan, Seksi Penanganan Sampah, Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Petugas Kebersihan serta masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu data yang terkumpulkan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Terdapat tiga indikator dalam penelitian ini yaitu Norma, Individu dalam organisasi, Struktur Sosial. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah adalah pada Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, melaksanakan pembagian tugas arahan dan pengawasan terhadap tugas bawahan, menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah, dimana dalam proses pelaksanaannya dilapangan masih banyak ditemukan hambatan seperti tidak adanya lokasi TPS maupun TPST sehingga sampah yang sudah diangkut namun tidak dapat membersihkannya secara menyeluruh yang dikarenakan lokasi TPA yang jauh sehingga memakan waktu untuk membersihkan secara menyeluruh, kemudian hal lain yaitu kurangnya sarpras seperti bak-bak sampah dan sarana pendukung lainnya yang disebabkan kurangnya anggaran dana dari pemerintah sehingga tidak bisa memenuhi segala kebutuhan dalam pengelolaan sampah serta tidak tetapnya jadwal pengambilan sampah dikarenakan kurangnya partisipasi daripada masyarakat untuk mengikuti arahan dan sosialisasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang sampah sebelum jam pengambilan sampah agar sampah dapat diangkut dan tidak terjadi penumpukan yang membuat pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi terhambat.

Kata Kunci: *Peranan, Pengelolaan Sampah*

**THE ROLE OF THE ENVIRONMENT SERVICE IN WASTE
MANAGEMENT IN PANGKALAN KERINCI DISTRICT, PELALAWAN
REGENCY**

ABSTRACT

Reza

This study aims to determine the role of the Environmental Service in waste management in Pangkalan Kerinci District and the inhibiting factors. This type of research is qualitative in which the informants come from the Head of the Waste Management Division of the DLH Pelalawan Regency, the Garbage Handling Section, the Head of the Neighborhood Association, Pangkalan Kerinci Urban Village, Cleaning Officers and the community. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. In this research, descriptive method is used, namely the data collected is classified based on the type and shape and then presented descriptively. There are three indicators in this study, namely norms, individuals in the organization, and social structure. The results of the study concluded that the role played by the Environmental Service in Waste Management is in Article 33 Paragraph (2) of the Regent's Regulation Number 65 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pelalawan Regency Environmental Service, namely providing waste management infrastructure. , carry out the division of tasks for direction and supervision of subordinate tasks, determine the location of TPS, TPST, and TPA waste, where in the implementation process in the field there are still many obstacles such as the absence of TPS and TPST locations so that the waste that has been transported but cannot clean it thoroughly because the location of the landfill is far away so it takes time to clean thoroughly, then another thing is the lack of infrastructure such as garbage bins and other supporting facilities due to a lack of budget funds from the government so that it cannot meet all needs in waste management as well as the irregular schedule of garbage collection due to the lack of participation from the community to follow the directions and socialization given by the Environmental Service to dispose of waste before garbage collection hours so that garbage can be transported and there is no buildup that hampers the implementation of waste management.

Keywords: *Role, Waste Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada aparat Pemerintah Pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dengan kata lain dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintahan adalah melakukan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan-tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuann menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan Urusan Pemerintahan

Absolut meliputi :

- a) Politik Luar Negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan Fiskal; dan
- f) Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat :

- a) Melaksanakan sendiri, atau
- b) Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.


Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi :

1. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 
- a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanian;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib tersebut, salah satunya adalah menangani urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-

undangan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah.

Didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah pada Bab I Pasal 3 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Mengatur Tentang :

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
- b. Penyelenggaraan pengelolaan sampah
- c. Kompensasi
- d. Pengembangan dan penerapan Teknologi
- e. Sistem informasi
- f. Peran masyarakat
- g. Pembinaan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya adalah urusan pemerintahan dalam Bidang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dinas Lingkungan Hidup terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan, adapun tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi, adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada Pasal 3 yang salah satu diantaranya berbunyi “Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup”.

Dari penjelasan uraian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, maka penulis ingin meneliti mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup memiliki bidang yang terkait dalam pengelolaan sampah, yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengurangan sampah , penanganan sampah serta seksi B3 dan limbah B3, untuk menjalankan tugasnya Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 pada Pasal 28 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 untuk mengurangi volume sampah terdapat seksi yang bertugas didalamnya yaitu Seksi Penanganan Sampah yang memiliki uraian tugas pada pasal 33 ayat (2) yakni :

1. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penanganan Sampah berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundangan undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Penanganan Sampah
3. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
4. Koordinasi dan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
5. Menyediakan sarpras penanganan sampah;
6. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
7. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
8. Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
9. Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan sampah;

10. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
11. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten / kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
12. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
13. Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
14. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
15. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
16. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
18. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi penanganan sampah;
20. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

21. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas dan fungsi Seksi Penanganan Sampah di atas, penulis hanya menilai point (5), (18) dan (19) dimana dijelaskan bahwa pemerintah dalam pengelolaan sampah wajib menyediakan sarana dan prasarana, karena sarpras merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, pemerintah juga melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi seksi penanganan sampah.

Salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang luasnya sekitar 13.924,94 km² ditempati oleh 12 kecamatan dan 14 kelurahan serta jumlah penduduk sebanyak 483.622 jiwa. Kabupaten Pelalawan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti dengan luas yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah 94.585 jiwa. Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini :

Tabel I.1 : Daftar Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Langgam	Langgam	32.997 jiwa
2	Kecamatan Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	94.585 jiwa
3	Kecamatan Bandar Sei Kijang	Sei Kijang	21.481 jiwa
4	Kecamatan Pangkalan Kuras	Sorek Satu	61.123 jiwa
5	Kecamatan Ukui	Ukui Satu	40.298 jiwa
6	Kecamatan Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	29.832 jiwa
7	Kecamatan Bunut	Pangkalan Bunut	15.465 jiwa
8	Kecamatan Pelalawan	Pelalawan	19.120 jiwa
9	Kecamatan Bandar Petalangan	Rawang Empat	16.447 jiwa
10	Kecamatan Kuala Kampar	Teluk Dalam	17.837 jiwa
11	Kecamatan Kerumutan	Kerumutan	24.420 jiwa
12	Kecamatan Teluk Meranti	Teluk Meranti	16.441 jiwa
Kabupaten Pelalawan			390.046 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pelalawan

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk 94.585 jiwa. Kecamatan Pangkalan Kerinci ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut. Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan. Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industri penghasil bubur kertas dan produk kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya

diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia.

Tingginya jumlah kepadatan penduduk dapat memberi perubahan terhadap pola hidup masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, hal ini juga berpengaruh pada sektor kesehatan lingkungan di daerah tersebut. Setiap masyarakat pasti menginginkan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup di daerah tempat tinggalnya. Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu, sampah, dan juga bau.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mendefinisikan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan termasuk Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dijelaskan didalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. **Pemilahan;**
Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah. Pengelompokan jenis sampah yang terdiri atas : sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat di daur ulang dan sampah lainnya.
- b. **Pengumpulan;**
Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan . pengumpulan sampah meliputi pola : individual langsung, individual tidak langsung, komunal langsung, komunal tidak langsung, dan penyapuan jalan. Pengumpulan sampah pengumpulan atas jenis sampah terpilah : pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah dan penyediaan sarana pengumpulan

sampah terpilah. Jenis sarana pengumpulan sampah dapat berupa : motor sampah, gerobak sampah, dan atau sepeda sampah.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dari TPS dan atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. Pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan perundang-undangan.

d. Pengolahan;

Pengolahan sampah meliputi kegiatan : pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan mengubah sampah menjadi sumber energy.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan atau teknologi ramah lingkungan. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA, meliputi kegiatan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah didalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai ruang lingkup” antara lain:

- a. Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengelola yang dibentuk masyarakat;

- b. Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); - Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan, dan; - Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA aau TPST.
- c. Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber TPS dan/ atau TPS 3R;
- d. Dalam pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara dari TPS ke TPA.

Dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci seperti kurangnya armada pengangkut sampah yang merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan sampah karena jumlah armada tidak sebanding dengan tingginya volume sampah yang harus diangkut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.II : Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Merek	Jenis	Tahun	Ket	
				Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	Mitsubishi 120 PS	Dump Truk	2000	✓	-
2	Mitsubishi 100 PS	Amroll Truk	2001	-	✓
3	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2003	✓	-
4	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2003	✓	-
5	Toyota Kijang	Pick Up	2003	✓	-

6	Toyota Dina 115 ET	Amroll Truk	2005	-	✓
7	Toyota Dina 125 ET	Dump Truk	2005	✓	-
8	Toyota Dina 125 ET	Amroll Truk	2005	-	-
9	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	-	✓
10	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	✓	-
11	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	✓	-
12	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	✓	-
13	Isuzu Elf 120 PS	Tangki Tinja	2007	-	✓
14	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	✓	-
15	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	✓	-
16	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	✓	-
17	Toyota Hilux	Pick UP	2007	-	✓
18	Toyota Hilux	Pick UP	2012	✓	-
19	Toyota Hilux	Pick UP	2012	✓	-
20	Toyota Dina 130 PS	Dump Truk	2013	✓	-
21	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	✓	-
22	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	✓	-
23	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	✓	-
24	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	✓	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masih belum memadai. Masih kurangnya alat baik itu untuk pengangkutan maupun pada pemrosesan akhir. Hanya tersisa 18 Dump Truk yang masih berfungsi yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sarana ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan sampah. Selain itu terdapat beberapa Pick UP serta 1 buah bulldozer dan 1 eskavator yang dimana bulldozer dan eskavator tersebut memiliki wilayah operasional di Kecamatan Pangkalan Kuras yang bersebelahan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci mengingat lokasi TPA terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga dioperasikan di wilayah tersebut. Untuk mengangkut sampah secara efektif dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, 18 Dump Truk tidak cukup untuk mengangkut sampah dengan waktu yang tepat, hal ini dapat menyebabkan banyaknya sampah berserakan, namun tidak hanya itu bulldozer yang digunakan tidaklah berfungsi seutuhnya, karena dibagian sekopnya mengalami kebocoran sehingga sampah tidak dapat di angkut secara tepat menyeluruh pada lokasi TPA tersebut.

Suatu lingkungan akan selalu ada kaitannya dengan sampah. Semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut jumlah volume sampah yang ada di kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari table berikut ini .

Tabel 1.III Rekap Penanganan Sampah (Kg/Bulan/Tahun) Kabupaten Pelalawan

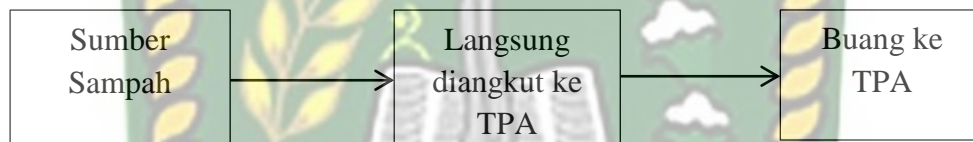
No	Bulan	2021 (Kg/Tahun)			
		TPA Kemang	TPST Sorek	SPA Ukui	Jumlah
1.	Januari	1.280.130	41.710	42.650	1.364.490
2.	Februari	1.187.320	44.350	43.050	1.274.720
3.	Maret	1.323.240	51.100	47.900	1.422.240
4.	April	1.393.785	45.620	45.900	1.485.305
5.	Mei	1.347.329	41.350	41.700	1.430.379
6.	Juni	1.315.180	48.850	49.350	1.413.380
7.	Juli	1.386.230	48.250	48.620	1.483.100
8.	Agustus	1.521.350	49.250	48.900	1.619.500
9.	September	0	48.550	49.200	97.750
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0
Jumlah		10.754.564	419.030	417.270	11.590.864
Rata-rata / Bln		2.688.641	34.919	34.773	965.905
Rata-rata / Hari		89.621	1.148	1.143	31.756

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah 2021

Dari table di atas dapat dilihat tingginya volume timbunan sampah yang ada di TPA Kemang yang dimana untuk sampah sekitar Kecamatan Pangkalan Kerinci tempat pembuangannya ada di TPA Kemang tersebut. Petugas kebersihan yang bekerja untuk mengangkut sampah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci untuk meletakkan sampah di depan rumah mereka masing-masing. Namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempermudah petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dapat dilihat dari tidak pedulinya masyarakat untuk ngumpulkan sampah kedalam kantong plastic

agar sampah yang penuh tidak berceceran diluar tong sampah sehingga ini membuat petugas kebersihan terutama pengangkut sampah menjadi tidak maksimal hasil kerjanya dikarenakan sampah-sampah yang menumpuk di tong sampah berceceran di sekitar tong sampah yang meharuskan petugas untuk memungutnya kembali satu persatu dan ini juga akan memperlambat jalannya pengangkutan sampah.

Gambar I.I
Mekanisme Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk pengangkutan sampah, masing-masing supir menggunakan Armada untuk mengangkut sampah itu sudah bergerak dari workshop mulai dari jam 6 Pagi dan kemudian langsung berkeliling mengangkut sampah sampai jam 9-10 Pagi. Dan perlu diketahui supir-supir itu sudah dibagi rute masing-masing untuk mengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi tidak berdasarkan kecamatan, namun berdasarkan pembagian rute masing masing Armada Pengangkut Sampah.

Dapat dilihat juga pada gambar mekanisme pengangkutan sampah diatas, terlihat bahwa sampah diangkut mulai dari sumber sampah langsung diangkut menggunakan armada dan dibawa ke pembuangan Akhir atau TPA, dari mekanisme ini dapat diketahui bahwa Kecamatan Pangkalan Kerinci tidak memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) karena sampah langsung di bawa

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melihat padatnya penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci sangat disayangkan jika tidak memiliki satupun TPS. TPS akan sangat membantu untuk meminimalisir pemborosan biaya bahan bakar Dumptruck yang digunakan untuk mengangkut sampah karena sampah bisa sementara waktu dikumpulkan ke TPS jika sudah penuh lalu diangkut ke TPA Kemang, sehingga bahan bakar untuk Dumptruck akan lebih minim karena tidak setiap hari harus ke TPA Kemang yang letaknya lumayan jauh dari pangkalan Kerinci yaitu diperbatasan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Kerinci.

Kemudian selain tidak adanya TPS dikecamatan pangkalan kerinci juga sulit ditemukan Tong sampah yang sesuai dengan Tipe sampah masing-masing, baik itu sampah organik, anorganik, maupun sampah bahan beracun. Selain tong sampah yang sesuai dengan tipe, tong sampah pada umumnya yang tidak ada pembagian tipenya juga jarang ditemukan, karena tidak setiap dari masing-masing rumah diberikan tong sampah hal ini juga mengakibatkan sebagian masyarakat menggunakan tanah kosong atau perkarangan rumah yang tidak ditunggu oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah mereka.

Selanjutnya tidak tetepnya jadwal pengambilan sampah serta keterlambatan jadwal pengangkutan sampah membuat volume sampah semakin menumpuk yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. jadwal pengangkutan sampah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.IV Jam Pengangkutan sampah setiap hari oleh mobil pengangkut sampah

Hari	Pagi	Sore (Khusus Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota)
Senin-Minggu	07.00 wib	17.00 wib

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari table di atas sudah dijelaskan jam pengangkutan sampah setiap harinya, sementara berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis banyak masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai jam pengangkutan sampah, dan khusus kelurahan pangkalan kerinci kota petugas kebersihan tidak selalu mengangkut sampah pada sore hari sesuai jadwal yang ditetapkan, mengingat banyaknya penduduk yang tinggal didaerah tersebut mengakibatnya akan selalu ada sampah yang menumpuk dan tidak terangkut, hal ini tentunya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak layak dipandang mata. Dan ini juga pastinya akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup terlihat dari tumpukan sampah yang sudah dibersihkan ternyata tidak efektif membersihkan secara menyeluruh.
- b. Kurangnya penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan tempat pengelompokan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti tong sampah atau tempat sampah sesuai dengan tipe sampah baik itu organik, anorganik, maupun sampah bahan beracun.

- c. Tidak tetapnya jadwal pengambilan sampah serta keterlambatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga masih ditemui tumpukan sampah yang sehari-hari tidak diangkat.
- d. Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup seperti sarana untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, eskavator yang dalam kondisi kurang memadai sehingga sampah tidak bisa dikelola dengan baik.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan dasar penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penelitian peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Peran atau kinerja dan Pengelolaan.
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan literature untuk semua yang memerlukan serta memberikan bahan masukan dan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pangkalan Kerinci terkait pengelolaan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c. Secara Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Riau terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie. 2011;5)

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan menurut Rasyid (1997:11) adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehiduoan secara wajar pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (fungsi pelayanan)
Yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan)
Yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri

karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur / alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Secara substantif, menurut Rasyid (2002:48) tugas pemerintahan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan
2. Pemberdayaan
3. Pembangunan

Menurut Syafie (2010:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun dengan pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah.

3. Konsep Peranan

Peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi (Sarwono, 2012).

Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok

tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut Pitana (dalam Ardianto, 2016), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peranan sebagai :

1. Koordinator, dalam pengelolaan sampah, peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai kordinator diperlukan agar upaya pengelolaan sampah dapat berjalan optimal. Pemerintah serta seluruh elemen masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar terciptanya kota yang Hijau.
2. Fasilitator, sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapula pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Stimulator, peran Dinas Lingkungan hidup sebagai stimulator adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan sampah.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Untuk menilai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengolahan Sampah ini menggunakan indikator peran. Untuk menilai peran organisasi suatu instansi dapat dilakukan dengan berbagai indicator. Dalam hal kaitannya bila ingin menilai peran yang telah dilakukan oleh organisasi publik, maka diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menganalisa peran organisasi, antara lain :

1. Koordinator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Koordinator adalah orang yang melakukan koordinasi atau yang mengoordinasi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator atau Instansi yang melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait

dengan pengelolaan sampah agar terciptanya koordinasi yang searah.

2. Fasilitator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas atau penyedia. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator atau penyedia sarana dan pra sarana untuk mendukung program yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan tupoksinya sebagai organisasi pemerintah yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup khususnya Pengolahan sampah.

3. Stimulator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Stimulator adalah orang atau sesuatu yang menstimulasi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai Stimulator atau orang yang mendorong agar dapat menciptakan suatu strategi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan teori di atas mengenai peran disini penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun peranan menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001:211) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Stogdil (dalam Giroth, 2004;25) memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Peran menurut Rivai (2004) juga dapat diartikan sebagai perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Sementara itu Judistira (Giroth, 2004;26) menyatakan bahwa teori-teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Pendapat lain juga dinyatakan oleh Cross (dalam Berry, 2003;105) peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma social dan oleh karena itu dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma didalam masyarakat.

Factor yang menentukan peranan yang akan dilakukan menurut Giroth (2004;27) :

- 1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yang sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
- 2) Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
- 3) Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalkan maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi di antara norma-norma.

4. Konsep Kebijakan

Menurut Kansil dan Cristine (2003;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan tertentu, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban actor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Menurut Wibawa (2011:3) kebijakan public adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan.

Menurut Nugroho (2004:100) kebijakan public dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan public (formulasi kebijakan), kedua bagaimana kebijakan public tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan public tersebut dievaluasi.

Masih Nugroho (2004) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

Menurut Eyestone (dalam Winarno. 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungan, konsep yang di tawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafaruddin 2008:76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi (Pasalog, 2008:92).

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “Polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa Latin yaitu Politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003;48)

Kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan. (Miriam Budiarmo 2008;20)

Sedangkan kebijakan public merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan. Maka diperlukan berbagai kebijakan public yang sesuai dan terarah agar supaya tujuannya berhasil dicapai secara efektif dan efisien (Adisasmita. 2011:113).

Menurut Dye dalam (Leo Agustino, 2008;7) mengemukakan bahwa kebijakan public adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friendrich dalam (Leo Agustino, 2008;7) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Friendrich (dalam Wahab 2004;3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018;12) mengemukakan bahwa kebijakan public adalah apa yang pemerintah katakana dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

5. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut E. Damanhuri (2004), Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek non teknis seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar dapat ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktifitas penanganan tersebut.

Neolaka (2008) Berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan Menurut Alex (2012) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah. dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit.

Menurut Poerdarminta (1991) bahwa pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Adapun usaha pengelolaan sampah. Menurut Slamet (1994) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah sampai perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya,

membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat sampah yang besar dan dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 22 menjelaskan bahwa :

1. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, yang dimaksud pengelolaan sampah ialah aktifitas yang sistematis, mencakup keseluruhan serta berkelanjutan termasuk pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- 1) Pembatasan timbulan sampah.
- 2) Pendaur ulangan sampah.
- 3) Re-use atau pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian kegiatan penanganan sampah yaitu:

- 1) Pengelompokan sampah berdasar dengan karakteristik dan sifatnya.
- 2) Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ke TPS.
- 3) Pengangkutan sampah melalui mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA;
- 4) Pengolahan melalui mengubah karakteristik, jumlah sampah, serta;
- 5) Pemrosesan akhir sampah berupa kembalinya sampah hasil olahan sebelumnya ke lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer sampah, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati 2009;24)

Menurut Hadiwiyoto (dalam Sejati 2009;13) sampah tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar kita, pengelolaan sampah adalah, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan dari material sampah. Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia dan juga biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan alam.

System pengelolaan sampah yang efektif harus terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan rantai dari pengelolaan sampah, yaitu tahap pemilahan sampah dan pengelolaan pada sumber, pengumpulan, pembuangan sementara, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Keberhasilan setiap tahapan tersebut sangat ditentukan oleh dukungan dari beberapa aspek yaitu pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek hukum dan peraturan yang mendukung (Dept, Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002).

6. Konsep Sampah

Sampah dapat didefinisikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan yang berupa padatan, yang dibuang karena sudah tidak berguna atau diperlukan lagi (Tchobanoglous,*et,al.*, 1993). Pengertian sampah menurut SK SNI T-13-1990-F adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sedangkan menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007).

Dalam Bahar (1986), sampah diidentifikasi menurut jenis-jenisnya yaitu :

- a. *Garbage* atau sampah basah yaitu sampah yang berasal dari sisa pengolahan, sisa pemasakan, atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai bahan makanan organisme lainnya.
- b. *Rubbish* atau sampah kering yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk dan dapat pula dibagi atas dua golongan, yaitu :
 - sampah yang tidak mudah membusuk, tetapi mudah terbakar.
 - sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar.
- c. *Ashes* dan *cinder*, yaitu berbagai jenis abu dan arang yang berasal dari kegiatan pembakaran.
- d. *Dead animal*, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan.
- e. *Street sweeping*, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan.
- f. *Industrial waste* merupakan sampah berasal dari kegiatan industry, sampah jenis ini biasanya lebih homogeny bila dibandingkan dengan sampah jenis lainnya.

Menurut Dirjen Cipta Karya (1992), sampah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sampah basah (*garbage*), yaitu sampah yang berasal dari sisa hasil pengolahan, sisa makanan atau sisa makanan yang telah

membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai makanan organisme lainnya.

- b. Sampah kering (*rubbish*), yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk. Sampah kering dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk tetapi mudah terbakar.
- c. Sampah lembut, yaitu sampah yang berasal dari berbagai jenis abu, merupakan partikel-partikel kecil yang mudah beterbangan dan dapat mengganggu pernafasan dan mata.
- d. Sampah berbahaya, terdiri dari sampah pathogen (berasal dari rumah sakit atau klinik), sampah beracun (yaitu sampah sisa-sisa pestisida, kertas bekas pembungkus bahan-bahan beracun, dan lain-lain), sampah radioaktif (sampah dari bahan nuklir), dan sampah yang dapat meledak (petasan, mesiu, dan sebagainya).
- e. sampah balokan (*bulky waste*), seperti mobil rusak, kulkas rusak, pohon tumbang, balok kayu, dan sebagainya.
- f. Sampah jalan, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan seperti sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas dan daun.
- g. Sampah bangunan, seperti potongan kayu, pecahan atap genteng, bata, buangan adukan.
- h. Sampah binatang mati, seperti bangkai tikus, ayam dan lain-lain.

- i. Sampah khusus, yaitu sampah dari benda-benda berharga, atau sampah dokumentasi.
- j. Sampah industry, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri.
- k. Sampah kandang atau pemotongan hewan, dapat pula berupa kotoran hewan, sisa makanannya, sisa-sisa daging, tulang, isi perut, dan sebagainya.
- l. Sampah lumpur, yaitu sampah setengah padat yang dapat berasal dari lumpur selokan, roil, lumpur dari bangunan pengolahan air buangan, septic tank dan sebagainya.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amalia Amanda. (2019). Jurnal Ilmu Administrasi Publik	<i>Kinerja Dinas lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar kemuning Kota Pontianak</i>	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Sampah 2. Sama-sama meneliti Dinas Lingkungan Hidup	1. Lebih Spesifik kepada Kinerjanya 2. Lokasi Penelitian Berbeda
2.	Sri Wahyuni, Gustaaf Budi Tampi, Rully Mambo. (2018). Jurnal Administrasi Publik	<i>Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado</i>	1. Sama-sama meneliti Dinas Lingkungan Hidup 2. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Sampah	Lokasi Penelitian Berbeda
3.	Tri Widodo. (2013). Jurnal Administrasi Negara	<i>Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda</i>	Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Sampah	Lokasi Penelitian Berbeda
4.	Sahra Yusna Nasution. (2020). Jurnal Ilmu Pemerintahan	<i>Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Medan Tembung</i>	Sama-sama meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah	Lokasi Penelitian Berbeda
5.	Dewita Sari, Syafruddin Ritonga. (2016). Jurnal Ilmu Administrasi Publik	<i>Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan</i>	Sama-sama meneliti Peran dan Pengelolaan Sampah	1. Lebih Spesifik kepada sampah rumah tangga 2. Lokasi penelitian berbeda

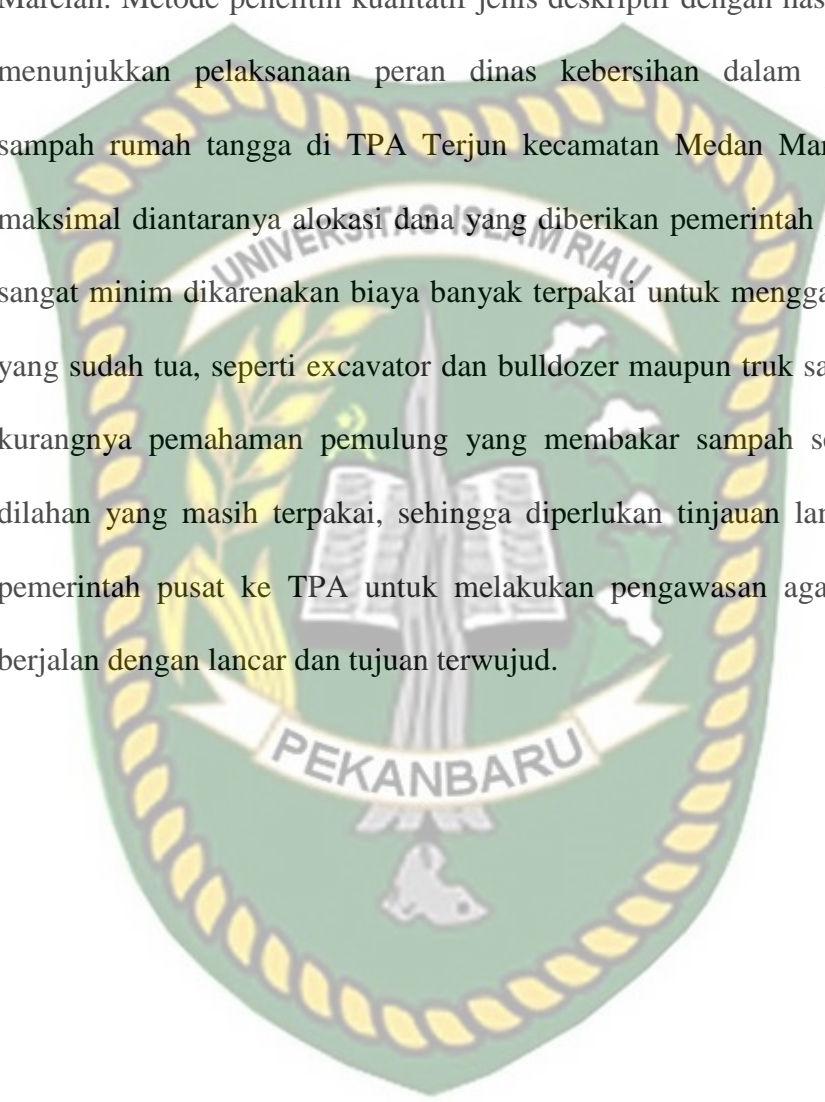
Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Selanjutnya penjelasan mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Amalia Amanda dengan judul kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dipasar kemuning kota Pontianak. Menganalisis tingkat kinerja dinas lingkungan hidup pada bidang pengelolaan sampah di pasar kemuning kota Pontianak, dengan fenomena belum optimalnya kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kinerja menurut Moehariono, dengan hasil penelitin penyebab belum optimalnya kinerja dinas lingkungan hidup pada bidang pengelolaan sampah adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana dan rotasi angkutan sampah dari TPS ke TPA tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Sri Wahyuni, Gustaaf Budi Tampi, Rully Mambo dengan judul kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dikota Manado. Menganalisis kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah dikota manado dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja dinas lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal produktivitas dengan mengumpulkan informasi dan aspirasi masyarakat mengenai layanan pemrosesan limbah melalui sosialisasi dan langsung turun ke lapangan, menyelenggarakan pertemuan antara perangkat daerah dan public juga seruan melalui media cetak/online lainnya. Tetapi dalam hal kualitas pelayanan masih kurang baik terutama ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan limbah serta penegasan aturan tentang sampah.

3. Tri Widodo dengan judul peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di pasar merdeka kota samarinda. Metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan hasil penelitian diketahui bahwa unit pasar sebagai pemegang peranan penting dalam pengelolaan pasar merdeka belum menjalankan peranannya secara maksimal. Dalam hal ini yaitu asas manajemen yang seharusnya diterapkan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Proses pengelolaan sampah di pasar merdeka sangat tergantung pada kondisi dan ketersediaan alat-alat penunjang, namun kebutuhan akan alat penunjang terhambat oleh kurangnya dana serta kurangnya perhatian dinas pasar untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan di unit pasar merdeka serta kurangnya sanksi tegas kepada masyarakat yg membuang sampah sembarangan.
4. Sahra Yusna Nasution dengan judul peranan dinas kebersihan dan pertamanan kota medan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kecamatan medan tembung. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peranan menurut Hardjanto. Dengan hasil penelitian mengukur dari keempat indikator diantaranya tiga indikator dapat dilaksanakan dengan baik meliputi equality (kesetaraan), consensus orientation (kesepakatan bersama), responsiveness. Satu diantaranya participation dalam pengelolaan sampah rumah tangga dinyatakan kurang optimal.faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana, petugas kebersihan, partisipasi, pengawasan dan sanksi/hukuman yang masih lemah.

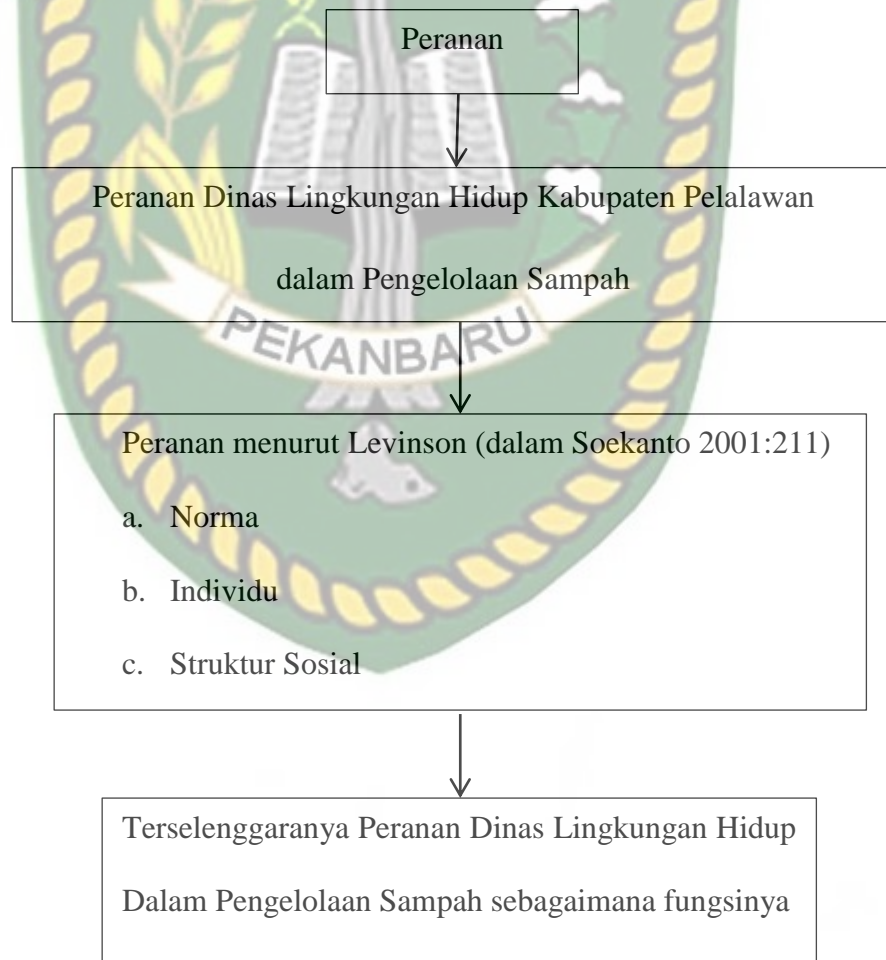
5. Dewita Sari, Syafruddin Ritonga dengan judul peran dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di TPA Terjun kecamatan Medan Marelan. Metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di TPA Terjun kecamatan Medan Marelan belum maksimal diantaranya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat masih sangat minim dikarenakan biaya banyak terpakai untuk mengganti alat-alat yang sudah tua, seperti excavator dan bulldozer maupun truk sampah, serta kurangnya pemahaman pemulung yang membakar sampah sembarangan dilahan yang masih terpakai, sehingga diperlukan tinjauan langsung oleh pemerintah pusat ke TPA untuk melakukan pengawasan agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan tujuan terwujud.



C. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian “Peran”, selanjutnya diukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka piker, dan peneliti menggunakan teori dari Soerjono Soekanto (2002:237). Dari poin-poin peranan dari teori Soerjono Soekanto, penulis menggunakan tiga (3) poin sebagai indikator. Adapun indikator yang digunakan adalah aturan, individu dan struktur social. Selanjutnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka pikir peran dinas lingkungan hidup kabupaten pelalawan dalam pengelolaan sampah di kecamatan pangkalan kerinci



Sumber : Modifikasi Penulis

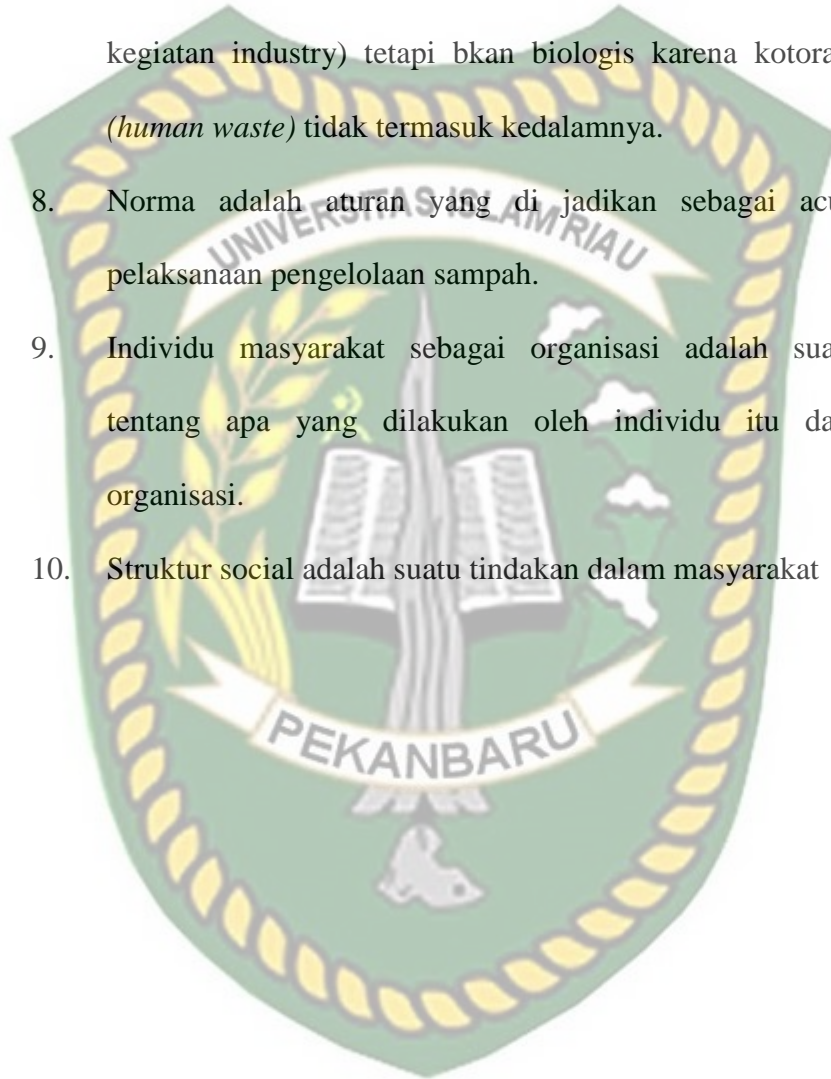
D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang di pakai antaranya :

1. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungan dengan masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu salah satu dinas yang memiliki wewenang terhadap pengelolaan sampah.
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu salah satunya melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah armada pengangkutan sampah dan tempat sampah atau wadah penampungan sampah.
6. Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia. Selain

itu sampah juga sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industry) tetapi bkan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya.

8. Norma adalah aturan yang di jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
9. Individu masyarakat sebagai organisasi adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu itu dalam suatu organisasi.
10. Struktur social adalah suatu tindakan dalam masyarakat



E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini adalah tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, adapun penjabaran variable-variabel tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel I.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;237), bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.	Pengelolaan Sampah	1. Norma 2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi 3. Individu dalam struktur social masyarakat	a. Aturan atau ketentuan yang secara jelas menjamin terlaksananya pengelolaan sampah b. Pemerintah DLH dalam melaksanakan pengelolaan sampah berjalan sesuai SOP a. Reliability atau kehandalan perangkat DLH dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara cepat dan tepat b. Fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini sudah efektif dalam menangani sampah a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan b. Mengayomi masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah termasuk aturan membuang sampah sesuai jam buang yang telah ditetapkan

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dalam penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan juga dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numeric. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat ditujukan untuk memahami suatu fenomena – fenomena social dari pada sudut pandang sebuah partisipan. Dengan demikian maka arti atau pengertian dari penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang dipakai untuk meneliti pada sebuah kondisi objek. Kondisi alamiah yang mana peneliti adalah sebuah instrument kunci (Sugiyono, 2005)

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkontruksi objek yang di teliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang – orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana peranan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu lingkungan kota Kecamatan Pangkalan Kerinci. Alasan pemilihan judul ini adalah karena di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih banyak terdapat permasalahan yang

berkaitan dengan sampah yang tentunya berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dimana tugas dan fungsinya yang kurang terlaksana dengan baik.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun dua jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

- Catatan hasil wawancara
- Hasil observasi lapangan
- Data-data mengenai informan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarrumidi, 2002 : 65). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, informan penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.3 Kunci Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Umur	Keterangan
1.	T. Indera Hidayat, SP	Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	50 Tahun	Kunci Informan
2	Iskandar, SP	Seksi Penanganan Sampah	52 Tahun	Informan
3	M. Aryanto	Petugas Kebersihan	40 Tahun	Informan
4	Adnan S.pd	Ketua RT	51 Tahun	Informan
5	Nuraida Pane	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci	40 Tahun	Informan
Jumlah				5

Sumber:Modifikasi Penulis

E. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005:223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informasi. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistic,

tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong,2005:298)

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian, dalam pengumpulan data, bila dilihat dari bentuk dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono:2010: 203).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topic penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku, literature, dasar hukum maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, baik itu data yang bersumber dari pemerintah desa dan masyarakat.

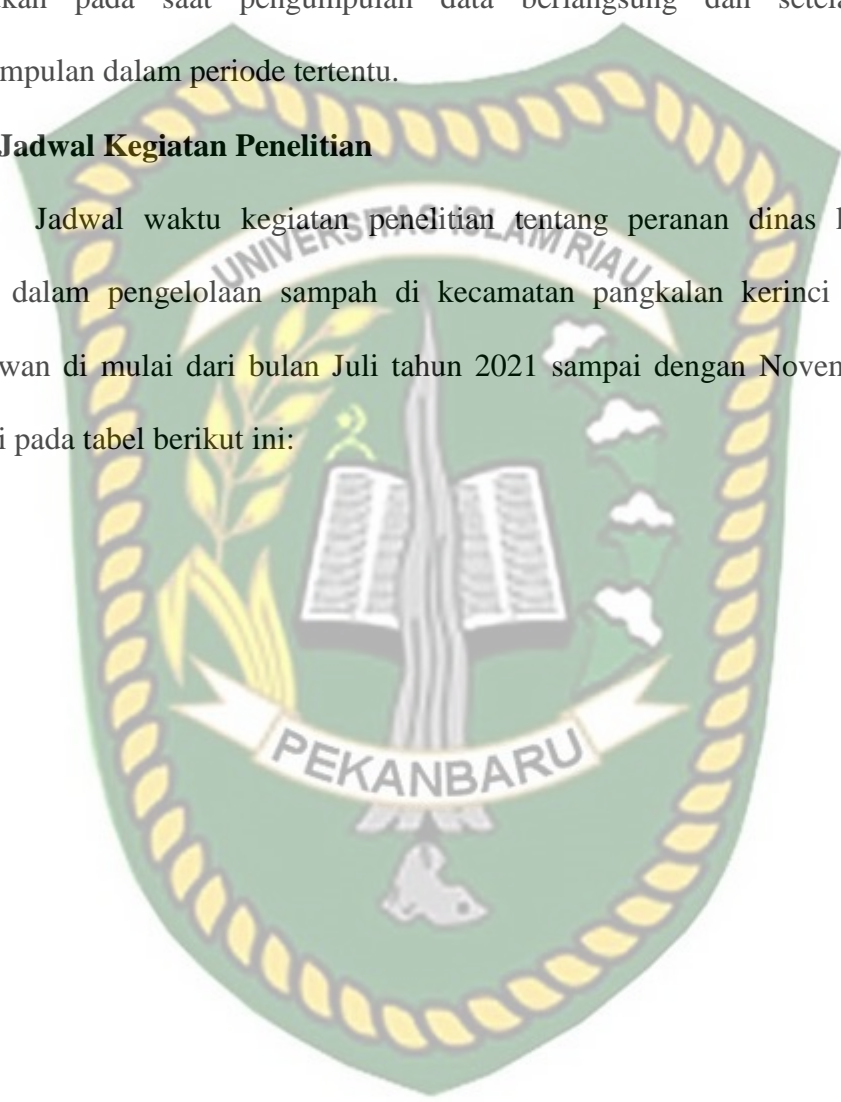
G. Teknik Analisis Data

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif.

Rancangan analisis dalam pengelolaan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interactive dari miles dan huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang peranan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan di mulai dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan November 2021 seperti pada tabel berikut ini:



Tabel III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		X	x	X	X	x														
2	Seminar UP							x													
3	Revisi UP								X												
4	Revisi Kuisisioner									x											
5	Rekomendasi Survey										x										
6	Survey Lapangan											x	X								
7	Analisis Data													x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)														x	X					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																x	x			
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																			x	
11	Revisi Skripsi																				x
12	Penggandaan Skripsi																				X

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Wilayah Kabupaten Pelalawan berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh maharaja Indra (sekitar Tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang dikalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini di hulu sungai Pekantua lebih kurang 20 KM di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan) pada tempat yang bernama Pematang Tuo.

Sekitar Tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan”. Sejak itu resmiah nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan dan nama ini terus dipakai sampai Kerajaan Pelalawan berakhir dan meleburkan diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan, namun setelah terbit surat Dirjen PUOD No. 138/177/PUOD pada tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 Kecamatan pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan

pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 kecamatan, namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan pangkalan Kerinci terdiri dari 7 desa yaitu : Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sei Kijang, Desa Rantau Baru, desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 kelurahan yaitu : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka Tahun 2005 Desa Sei Kijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pangkalan kerinci adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan raya lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau. Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat,

Kelurahan kerinci Kota dan Kelurahan kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa makmur dan desa Rantau Baru.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kurang lebih 35.056,8 Ha. Wilayah dengan luas tersebut dibagi atas beberapa wilayah seperti yang terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel IV.1:Pembagian Luas Wilayah

No	Jenis Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1.	Tanah Kering	4.151
2.	Tanah Basah	6.455
3.	Tanah Hutan	18.286
4.	Tanah Perkebunan	5.135
5.	Tanah Keperluan fasilitas Sosial	13,3
6.	Lain-lain (tanah Tandus)	1026,5
Jumlah		35.066,8

Sumber:Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan kerinci ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Pelalawan.

B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

a. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Berdasarkan data statistic kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti table di bawah ini:

Tabel IV.2:Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	48.673
2.	Perempuan	45.942
Jumlah		94.615

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari table diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 48.673 jiwa penduduk laki-laki dan 45.942 jiwa penduduk perempuan. Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 94.615 jiwa.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu factor penunjang kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, apabila semakin pesat perkembangan pendidikan suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu. Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan yang di klasifikasikan dalam table berikut:

Tabel IV.3:Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Belum Sekolah	7.519
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	4.995
3	Tamat SD/Sederajat	4.327
4	Tamat SLTP/Sederajat	9.228
5	Tamat SLTA/Sederajat	40.257
6	Tamat Akademi/Sederajat	10.974
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	13.830
8	Buta Huruf	3.485
Jumlah		94.615

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari table di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tamat SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 40.257 jiwa, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci tergolong cukup baik.

c. Agama

Selain dalam Bidang Pendidikan factor yang menunjang pningkatan kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah juga di dukung oleh factor moralitas masing – masing individu daerah tersebut. Tentunya factor ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut individu itu sendiri. Menurut data yang bersumber dari Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, Penduduk wilayah ini mayoritas beragama islam. Tetapi selain itu, di daerah ini juga berkembang agama yang lain yaitu meliputi Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha, berikut Jumlah Penduduk yang digolongkan berdasarkan agama yang dianut sesuai data pada table dibawah ini:

Tabel IV.4: Pembagian Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Islam	73.717
2	Khatolik	4.403
3	Protestan	15.575
4	Hindu	280
5	Budha	640
Jumlah		94.615

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari table diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama islam sangat dominan di wilayah ini yaitu berjumlah 68.842 jiwa. Agama yang beragam tidak membuat antar masyarakat saling bertikai dalam urusan agama, mereka tetep bisa saling menghargai dan menghormati terbukti dengan lancarnya segala kegiatan beragam yang dilaksanakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini tanpa adanya gangguan dari pemeluk agama lain.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Sebagai Kabupaten baru pada saat 1999 yang merupakan hasil pemekaran, maka instansi pemerintahan yang ada masih mengikuti instansi pada Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kampar Instansi yang menangani lingkungan hidup pada masa baru pemekaran bernama Badan Penanggulangan Dampak Daerah (Bapedalda). Pada tahun 2002 dibentuk SOTK baru dan Bapedalda berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan memiliki bidang.

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pelalawan

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu – isu strateis Kabupaten Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan tiga tahun kedepan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki. maka visi Dinas Lingkungan Hidup adalah: “menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan motifator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang professional guna mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai kabupaten terdepan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan pada tahun 2030.

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pelalawan

Dalam usaha pencapaian visi tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima bidang lingkungan hidup bagi masyarakat

2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pengelolaan lingkungan.
 - c. Melakukan upaya pengawasan (controlling) terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan
 - d. Mewujudkan upaa penegakan hokum terhadap pelaku pelanggaran undang – undang lingkungan hidup guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melaksanakan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanaa perencanaan, pelaksanaa kegiatan, monitoring dan evaluasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati. Adapun rincian tugasnya:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas lingkungan Hidup.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 mempunyai Tugas yaitu: Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta Seksi B3 dan Limbah B3. Adapun Fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsinya

Seksi Pengurangan Sampah memiliki Tugas, yaitu :

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengurangan Sampah berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
- b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundangan-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pengurangan Sampah
- c. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten
- d. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- e. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah
- f. Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industry
- g. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- h. Membina pendaurulangan sampah
- i. Menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah

- j. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- l. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Seksi Pengurangan Sampah
- n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penanganan Sampah memiliki Tugas, yaitu :

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penanganan Sampah berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup
- b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan , petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman / ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Penanganan Sampah
- c. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten
- d. Koordinasi dan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah
- e. Menyediakan sarpras penanganan sampah

- 
- f. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
 - g. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
 - h. Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping
 - i. Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan sampah
 - j. Memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah
 - k. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
 - l. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
 - m. Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
 - n. Melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
 - o. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
 - p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- r. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Penanganan Sampah
- t. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil Kesimpulan mengenai Pengelolaan Sampah, khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun data dan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pemberi gambaran dari responden penelitian, kemudian akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Petugas Kebersihan dan Masyarakat.

Tabel V.I: Identitas Informan Penelitian Penulis tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Nama	Jabatan	Umur	Keterangan
1.	T. Indera Hidayat, SP	Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	50 Tahun	Kunci Informan
2	Iskandar, SP	Seksi Penanganan Sampah	52 Tahun	Informan
3	M. Aryanto	Petugas Kebersihan	40 Tahun	Informan
4	Adnan S.pd	Ketua RT	51 Tahun	Informan
5	Nuraida Pane	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci	40 Tahun	Informan

B. Hasil Penelitian Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peranan menurut Levinson (dalam Soekanto 2001:211) dimana indikator-indikator tersebut adalah :

1. Norma
2. Individu
3. Kontruksi Sosial

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator – indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 8 (delapan) orang yang telah ditetapkan, pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul penelitiannya.

1. Norma

Norma merupakan sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatumasyarakat agar dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan (Soerjono Soekanto: 1989). Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu maupun

kelompok. Jika aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu norma memiliki yang sifatnya memaksa.

Norma juga diartikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi.

Pada dasarnya peraturan merupakan suatu pedoman atau landasan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka dampak yang ditimbulkan antara manusia didalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang wenangnya tanpa kendali. Dengan adanya aturan tersebut pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak T. Indera Hidayat, SP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pelalawan pada hari senin tanggal 11 Oktober pukul 11.30 WIB tentang aturan atau ketentuan yang secara jelas menjamin terlaksananya pengelolaan sampah apakah sudah sesuai sop, beliau mengatakan bahwa :

“mengenai peraturan dan SOP pengelolaan sampah selama ini kami dari pemerintah sudah sesuai dan memenuhi prosedur, hanya saja yang menjadi permasalahan itu timbul dari pihak masyarakat mereka tidak mematuhi aturan yang dibuat pemerintah, sudah dijelaskan dalam perda no 10 tahun 2017 pasal 2 bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang artinya tidak hanya dinas yang bersangkutan namun masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, dan juga pada pasal 18 dan 19 sudah dijelaskan ketentuannya ”

Berdasarkan pernyataan key informan, dapat dilihat bahwa aturan hukum terkait pengelolaan sampah sudah di muat didalam peraturan yang sudah ditetapkan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebersihan dan Keindahan. Namun sampai saat ini masih banyak pelaku – pelaku yang tidak mengindahkan aturan mengenai kebersihan dan keindahan yang sudah ada tersebut. Sedangkan hasil wawancara selanjutnya penulis dengan Bapak Iskandar, SP selaku Seksi Penanganan Sampah pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa :

“Aturan mengenai pengelolaan sampah yang hingga kini masih berlaku terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebersihan dan Keindahan, dan kami juga sudah menjalankan sesuai sop, tetapi pada umumnya walaupun sudah ada aturan namun sejauh ini penerapan aturan yang dilakukan masyarakat tersebut masih kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan tersebut”.

Dari pernyataan informan dapat dilihat bahwa pernyataannya sama dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang dimana beliau menyebutkan aturan mengenai kebersihan dan keindahan sudah ada namun tidak banyak dari masyarakat yang mentaati aturan tersebut dan beliau juga menyebutkan sudah menjalankan tanggungjawabnya sesuai sop. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas Kebersihan Bapak M. Aryanto pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 08.00 WIB, berikut hasil wawancaranya:

“kami petugas kebersihan sudah melaksanakan pengelolaan sampah ini sesuai aturan dan sop yang berlaku tetapi banyak dari masyarakat yang berbanding terbalik, banyak masyarakat tidak menjalankan aturan dan tidak peduli terhadap lingkungan”.

Dari pernyataan informan, petugas sudah melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan sopnya tetapi banyak dari masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengikuti peraturan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adnan S.Pd selaku Ketua RT.02/RW.14 Kel. Pangkalan Kerinci Kota pada hari senin tanggal 11 Oktober pukul 01.00 WIB, beliau memberi tanggapan :

“mengenai sop dan peraturan itu memang ada, tetapi tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui secara detail tentang bagaimana sop dan isi dari peraturan tersebut”.

Dari pernyataan informan diatas, bahwa masyarakat mengetahui adanya aturan hukum mengenai kebersihan tersebut, namun mereka tidak mengetahui secara rinci hal apa saja yang ada di dalam peraturan tersebut dan berikut juga dengan sopnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Ibu Nuraida Pane yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Setau saya sih memang ada, namun saya tidak terlalu paham dengan aturan tersebut apalagi dengan sopnya”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu dari sekian banyak orang yg membuang sampah sembarangan Rina Marni yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Tidak hanya saya, semua orang pasti pernah membuang sampah sembarangan, entah karena reflek ataupun sudah kebiasaan, dan sejujurnya saya tidak ingin halaman saya lama lama berbau sampah, jadi saya kalau sampahnya belum di angkut saya lebih memilih membuangnya ke tempat lain atau lahan lain yg tidak ada penghuninya seperti lahan lahan kosong”.

Dari pernyataan informan diatas, bahwa aturan tentang kebersihan ini pada umumnya memang ada, hanya saja mereka tidak mengetahui secara

keseluruhan mengenai isi dari aturan tersebut Dan salah satu dari pernyataan masyarakat yg kontra terhadap pengelolaan sampah ini yg menyatakan beliau sudah terbiasa membuang sampah dilahan kosong dan salah satu alasannya karna beliau tidak ingin rumahnya lama lama berbau sampah jadi beliau lebih memilih membuangnya ke lahan kosong yg tidak berpenghuni.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, dapat dilihat dari indikator norma atau aturan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci ini disimpulkan bahwa peran serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, ini terlihat dari tidak pedulinya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sedangkan dinas yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya namun sebagian masyarakat hanya menuntut pemerintah untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih namun tanpa ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, peneliti melihat dari indikator norma, bahwa memang benar sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, setelah ditelusuri oleh peneliti melalui tanya jawab dengan masyarakat sekitar, peneliti menemukan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan yang sudah di tetapkan pemerintah sehingga pengelolaan sampah menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator norma pengelolaan sampah ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan masih banyak juga yang tidak mengetahui secara rinci isi dari peraturan

tersebut, pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap pelanggar atau masyarakat yang tidak mengikuti aturan dan menjelaskan se jelasnya mengenai aturan tersebut untuk memberikan efek agar terciptanya kepedulian kepada setiap orang terhadap lingkungan.

2. Individu dalam Organisasi

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap sesuatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau talenta mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Iskandar, SP selaku Seksi Penanganan Sampah pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 09.00 WIB mengenai kehandalan atau kemampuan dan fasilitas yang diberikan dalam pengelolaan sampah ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kami dari DLH Kabupaten Pelalawan sudah memiliki kehandalan dibidangnya terutama dalam menangani permasalahan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, sehingga dalam mengerjakan tugas yang diberikan kami melaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga kami mampu bekerja dengan baik untuk masyarakat dan untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini tentunya dibutuhkan sarana-prasarana, DLH sudah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti tong sampah dan kantong-kantong sampah, namun ada beberapa keluhan mengenai hilangnya tong sampah yang diberikan pihak DLH dan keluhan masyarakat yang tidak mau halaman rumahnya diletakkan tong sampah sebab tong sampah tersebut selalu dipenuhi oleh sampah orang-orang yang tidak dikenal yang melemparkan sampahnya sembarangan sehingga halaman mereka kotor karena sampah yang berserakan, selain itu DLH juga sudah menyediakan beberapa unit truk mengangkut sampah ke TPA hanya saja meningkatnya volume sampah membuat kami membutuhkan sarana lebih dan lahan TPS juga belum tersedia sehingga jika pekerjaan

bawahan kami yaitu petugas kebersihan tidak bersih menyeluruh dalam membersihkan sampah harap untuk dapat dimaklumi karena harus mengejar target dikarenakan lokasi TPA yang lumayan jauh, jadi kami mengharapkan kerjasama dari masyarakat ”.

Dari pernyataan key informan, DLH sudah melaksanakan tugasnya sesuai pada bidangnya dalam pengelolaan sampah sehingga mereka mampu bekerja dengan baik untuk masyarakat dan juga DLH sudah menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mengelola sampah ini namun seiring bertambahnya jumlah penduduk bertambah juga volume sampah maka makin banyak pula sarana prasarana yang dibutuhkan namun DLH belum dapat memenuhinya tampak dari kurangnya bak-bak sampah serta tidak adanya lahan TPS sehingga terkendala dalam hal pengelolaan sampah ini dan masih ada pula masyarakat yang mencuri tong sampah dan membuang sampah sembarangan dipekarangan rumah orang lain. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak T. Indera Hidayat, SP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada hari senin tanggal 11 Oktober pukul 11.30 WIB hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan beliau, hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Ya kami dari dinas ini merasa sudah maksimal dalam menangani permasalahan sampah ini dan sudah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kami, untuk sarana prasarana kita sudah memberikan, kita sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk mengelola sampah ini, seperti truk pengangkut sampah, tong sampah di rumah-rumah masyarakat, kita sudah menyediakan TPA yang jauh dari pemukiman serta tempat pengelolaan sampahnya untuk fasilitas pendukung lain Seperti tong sampah yg sesuai dengan tipe tipe sampah Dan fasilitas pendukung lainnya yang masih kurang kita harus bersabar karena fasilitas ini didapat dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah dimana kita harus menunggu pencairan dana untuk memenuhi fasilitas pendukung lainnya dan yang juga harus diketahui bahwa pemerintah juga belum tentu memenuhinya ”.

Dari pernyataan informan, DLH sudah melaksanakan tugasnya dan DLH juga sudah menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah, namun untuk fasilitas tambahan lainnya dan fasilitas lain yang masih kekurangan, DLH tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan sampah ini. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Aryanto selaku Petugas Kebersihan pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 8.00 WIB, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan sampah ini kami sudah bergerak sesuai kemampuan kami dan kami petugas kebersihan juga mempunyai bidang masing-masing yang dirasa sudah melaksanakan tugas sesuai pada bidangnya masing-masing, dan untuk sarana prasarana sudah tersedia dari DLH, namun selain itu kami mengharapkan masyarakatnya juga harus ikut membantu meringankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai petugas kebersihan, paling tidak menjaga kebersihan disekitar rumah masing-masing karena sangat tidak mungkin kami mengutip sampah-sampah yang berserakan dihalaman rumah mereka satu persatu sedangkan masih banyak rumah yang belum diangkut sampahnya jika tidak segera diangkut sampah akan bertambah terus sedangkan lokasi TPA lumayan jauh”.

Dari pernyataan informan, petugas kebersihan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dalam bidang masing-masing dan sarana prasarana juga tersedia namun petugas kebersihan mengharapkan partisipasi dari masyarakat agar pengelolaan sampah dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adnan S.Pd selaku Ketua RT.02/RW.14 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, beliau mengatakan bahwa :

“Saya rasa pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sesuai pada bidangnya masing-masing untuk menangani permasalahan sampah ini, hanya saja masyarakat juga harus ikut berpartisipasi didalamnya karena bagaimanapun permasalahan sampah tidak ada habisnya sehingga dalam permasalahan ini masyarakat juga ikut bahu-

membahu bersama pemerintah. Mengenai fasilitas bisa kita lihat sendiri dinas sudah memenuhinya ”

Dari pernyataan informan, pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sesuai pada bidangnya masing-masing dalam menangani permasalahan sampah namun tetap harus dibantu oleh masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah dinas terkait juga sudah menyediakannya. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nuraida Pane selaku masyarakat kecamatan pangkalan kerici pada hari kamis tanggal 7 Oktober pukul 12.00 WIB hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Sepertinya sudah sesuai kemampuan namun tetap saja masih ada kekurangannya terbukti dari sampah yang sudah diangkut tapi tidak bersih mengangkutnya masih banyak sampah yang berceceran tapi tidak dikutip dan masih ada beberapa rumah yang tidak memiliki tong sampah dipekarangannya”.

Dari pernyataan informan, DLH sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing, tetapi masih ditemukan sampah yang diangkut tidak secara menyeluruh dibersihkan dan masih ada masyarakat yang tidak memiliki tong sampah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, dapat dilihat dari indikator individu, DLH sudah berperan sesuai dengan tugasnya di bidang masing-masing dengan baik, terutama dalam menangani permasalahan sampah. Sedangkan mengenai fasilitas atau sarana-prasarana yang mendukung dalam terlaksananya pengelolaan sampah tersebut DLH belum dapat menyediakan seluruhnya dikarenakan terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga terbatas pula sarana prasarana untuk pengelolaan sampah ini sehingga ini menjadi suatu hambatan dalam mengelolah sampah.

Namun minimnya fasilitas yang ada ini, masyarakat juga harus tetap menjaganya fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, peneliti melihat dari indikator Individu, dalam pengelolaan sampah ini DLH sudah berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan sebaik mungkin, dapat dilihat di lapangan pada saat pengangkutan sampah, petugas kebersihan melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah, hanya saja pengangkutan sampah ini belum dilakukan dengan sebaik-baiknya ini dapat dilihat masih adanya sisa-sisa sampah yang berserakan di sekitar tong sampah sehingga masih sering ditemukan sampah-sampah berserakan yang tidak diangkut menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator Individu, dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah DLH masih belum melakukan dengan teliti karena masih ditemukan sampah yang sudah diangkut namun tidak dibersihkan secara menyeluruh terlihat dari masih adanya sisa sampah yang berserakan di sekitar bak sampah yang sudah di angkut tadi sehingga dapat dikatakan dinas terkait belum berperan dalam pengelolaan sampah dan adanya keterbatasan anggaran dana dari pemerintah menyebabkan terbatas pula sarana prasarana yang dibutuhkan DLH untuk pengelolaan sampah ini. Selain itu tidak adanya lahan TPS serta lahan TPA yang begitu jauh membuat petugas kebersihan harus bekerja lebih cepat karena banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang sampahnya belum diangkut yang akan membuat menumpuknya sampah dan menyebabkan pencemaran udara.

3. Struktur Sosial / Individu dalam Struktur Sosial Masyarakat

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang memiliki peranan penting bagi struktur social masyarakat. Pengertian struktur adalah suatu kumpuln individu yang mana didalamnya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik pada masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

Struktur social adalah hubungan timbal balik antara posisi –posisi serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam strktur tersebut. Struktur social juga merupakan tatanan social dalam kehidupan masyarakat, didalam struktur social terdapat terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak T. Indera Hidayat, SP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada hari senin tanggal 11 Oktober pukul 11.30 WIB, mengenai sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dan bagaimana dinas terkait mengayomi masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah, hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dari dinas sendiri sudah melakukan sosialisasi ke-kecamatan dan ke-kelurahan termasuk juga ke setiap RT dengan harapan RT dapat meneruskannya ke masyarakat selain itu kami juga melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci agar seluruh masyarakat tidak memandang usia baik anak-anak, remaja, dewasa tergerak untuk bersama-sama mengelola lingkungan dengan baik yang dimulai pada diri semdiri dan lingkungan sendiri, sehingga akan meminimalisir oknum-oknum yang tidak mengikuti peraturan”.

Dari pernyataan key informan, DLH sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada setiap pelaku penghasil sampah sehingga setiap orang baik anak-anak, remaja hingga dewasa paham pentingnya untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan dan patuh terhadap aturan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar, SP selaku Seksi Penanganan Sampah pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 09.00 WIB mengenai sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana dinas terkait mengayomi masyarakat untuk mematuhi aturan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“kami sudah melakukan sosialisasi ke berbagai lokasi, dan juga kepada RT karena RT diyakini lebih dapat mengontrol warganya, sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak selalu sia-sia karena tidak sedikit dari masyarakat yang enggan untuk menghadiri acara sosialisasi yang kami berikan, sehingga dengan adanya ketegasan dari RT dapat memberikan efek yang baik terhadap lingkungan karena banyak dari warganya yang diharapkan akan patuh terhadap aturan terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Dan untuk jadwal sampah kami sudah menerapkannya bahwa untuk wilayah kerinci kota diambil sampahnya 2x sehari jam 7 pagi dan jam 5 sore, untuk wilayah lain dikerinci selain kerinci kota hanya di kutip di pagi hari mulai dari jam 7 pagi, untuk wilayah kerinci kota kami memberikan waktu 2x sehari dikarenakan penduduknya yg lebih banyak dari pada wilayah lain, untuk kendala sampah menumpuk itu bukan hanya karena kesalahan dari kami, karena petugas kebersihan biasanya sudah mulai mengutip sampah dari jam 7 pagi, kemungkinan mereka yg sampahnya tidak diangkut petugas kebersihan sudah lebih dulu ke wilayahnya hanya saja masyarakat belum meletakkan sampahnya ditong sampah depan rumah mereka sehingga sampah baru bisa diangkut esok paginya lagi itu juga yg membuat sampah jadi menumpuk ”.

Dari pernyataan informan, DLH sudah melakukan sosialisasi terutama pada RT karena diyakini RT dapat mengontrol dan mengawasi warganya agar mengindahkan sosialisasi dan aturan yang diberikan sehingga sosialisasi membuahkan hasil yang baik. Informan juga menyampaikan bahwa jadwal

pengangkutan sampah untuk seluruh wilayah dilakukan setiap hari dan pada pagi hari mulai dari jam 07:00 pagi dan terkhusus wilayah pangkalan kerinci kota dilakukan pengangkutan sampah 2x dalam sehari yaitu pagi hari pukul 07:00 dan pada pukul 17:00 sore dikarenakan penduduk di wilayah pangkalan kerinci kota lebih banyak, jadi melalui sosialisasi itu diharapkan masyarakat mematuhi aturan agar dapat mengumpulkan sampahnya sebelum jam 07:00 pagi agar tidak ada rumah yang terlewat yang membuat sampahnya tidak dapat diangkat dan harus kembali di esok hari untuk mengangkat sampah tersebut yang membuat pencemaran udara karena menumpuknya sampah-sampah tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Aryanto selaku petugas kebersihan pada hari jum'at tanggal 8 Oktober pukul 08.00 WIB, yang hasil wawacaranya sebagai berikut :

“Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tentunya sudah dapat dipastikan pernah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat yang biasanya diwakili oleh ketua maupun staf-staf dibidang pengelolaan sampah Kalau untuk jadwal pengambilan sampah kami merasa sudah sesuai aturan yg di tetapkan , kami mulai mengangkat sampah di rumah rumah warga itu mulai dari jam 7 pagi, jd sebelum jam 7 pagi masyarakat diharapkan sudah mengumpulkan sampahnya di pekarangan rumah mereka yg ada tong sampahnya, walaupun tidak ada tong sampah mereka bisa menggunakan kantong plastik besar dan mengumpulkannya menjadi satu tempat dan di letakkan di depan rumah mereka nanti akan kami kutip, namun kebanyakan dari mereka tidak membuang sampah di bawah jam 7, melainkan di atas jam 7 , sehingga kami sudah melewati wilayahnya yg dari awal kami tidak menemukan adanya kantong plastik sampah sehingga kalau mereka meletakkan sampahnya di atas jam 7 kami baru bisa mengangkatnya lagi esok hari di pagi hari juga, karena kalau truk sampah sudah full kami langsung ke lokasi TPA”.

Dari pernyataan informan, DLH sudah melakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan ke beberapa lokasi dan pernyataannya masih sama dengan yang

sebelumnya menyebutkan jadwal pengambilan sampah dimulai dari jam 07:00 pagi Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adnan S.Pd selaku Ketua RT.02/RW.14 Kel. Pangkalan Kerinci Kota pada hari senin tanggal 11 Oktober pukul 01.00 WIB, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“kami dari RT juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga kami, namun ada beberapa yang mematuhi dan ada beberapa yang tidak mengindahkan sama sekali terlihat dari masih banyak yang membuang sampah diluar jam angkut dan ada juga warga yang membuang sampah sembarangan dengan cara sembunyi-sembunyi Yang dimana juga kita ketahui bahwa sifat manusia berbeda beda, walaupun pendidikan tinggi tidak serta merta sifat dan sikap mengikuti sesuai pendidikannya, jadi kuncinya ada di diri kita masing masing, jika ingin sehat dan tinggal dilingkungan yg bersih maka jagalah kebersihan minimal untuk diri sendiri”.

Dari pernyataan informan, beliau sebagai RT yang diamanatkan untuk dapat menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lingkungannya menilai masih banyak warga yang tidak mengindahkan sosialisasi yang diberikan terlihat dari warga membuang sampah diluar jam angkut dan warga yang sembunyi-sembunyi untuk membuang sampah sembarangan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuraida Pane selaku masyarakat kecamatan pangkalan kerinci pada hari kamis tanggal 7 Oktober pukul 12.00 WIB, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Ya mereka ada memberikan sosialisasi, ada beberapa yang ikut dan ada beberapa pula yang tidak hadir termasuk saya, karena saya harus mengurus anak-anak dirumah dan menyelesaikan segala pekerjaan saya dirumah, dan ya saya terkadang membuang sampah agak terlambat karena pekerjaan rumah baru selesai menjelang siang dan disitu saya baru sempat membuang sampah”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurul Hidayat selaku masyarakat kecamatan pangkalan kerinci pada hari kamis tanggal 7 Oktober pukul 12.30 WIB, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Saya pekerjaannya menjaga toko sparepart motor, kebetulan saya belum menikah dan tinggal sendiri di toko ini, jadi saya kurang peduli kalau ternyata harus mengumpulkan sampah dibawah jam 7 pagi, saya sendiri juga masih suka kesiangan bangunnya, saya buka toko jam 8 pagi, jadi saya baru mengumpulkan sampah ketika saya sudah buka toko, pada malam hari saya tidak mau mengumpulkan sampahnya karena nanti takut di acak acak pemulung yg tidak bertanggung jawab”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi yang diberikan dari dinas terkait memang ada namun beliau tidak menghadiri karena urusan pekerjaan rumah sehingga sosialisasi tidak tersampaikan merata dan salah satu pelaku yang tidak mengindahkan peraturan karena tidak membuang sampah sesuai jadwal pengangkutan sampah yang disebabkan pekerjaan rumahnya baru selesai menjelang siang dan ada juga pernyataan informan yg menyatakan bahwa beliau masih suka bangun kesiangan sehingga telat untuk mengumpulkan sampah sehingga petugas kebersihan melewati wilayahnya dan akan kembali esok hari untuk mengumpulkan sampahnya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, dapat dilihat dari indikator kontruksi social mengenai pengelolaan sampah bahwa dinas lingkungan hidup sudah melakukan sosialisasi agar meminimalisir jumlah sampah yang ada saat ini namun tidak sedikit masyarakat yang masih tidak peduli terhadap pesan dari sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, peneliti melihat pada indikator kontruksi social mengenai

pengelolaan sampah dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan tidak banyak yang mengindahkan terlebih dari tidak meratanya sosialisasi yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat terlihat masyarakat yang tidak bisa memberikan sedikit waktunya untuk ikut bergabung mendengarkan sosialisasi yang diberikan sehingga sosialisipun masih dinilai belum efektif untuk membuka fikiran masyarakat agar sadar pentingnya menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator kontruksi social bahwa sosialisasi yang diberikan dalam rangka memberikan pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sudah dilakukan namun masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang membuang sampah secara sembunyi-sembunyi serta masih banyak yang membuang sampah diluar jadwal pengakutan sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah ini segala hal atau upaya yang dilakukan akan tidak maksimal hasilnya jika masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh DLH di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan DLH dan masyarakat.

Hambatan dalam pengelolaan sampah ini, Kepala Bidang pengelolaan

Sampah mengungkapkan:

“Ya hambatan itu sedikit banyaknya pasti ada, adapun beberapa kendalanya yaitu keterbatasan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan sampah salah satu penyebab ini juga karena tidak rutinnya masyarakat membayar biaya retribusi sampah bahkan ada yang sampai tidak pernah membayar sekalipun, meskipun begitu sampahnya tetap kita angkut, dan untuk Tong sampah kita sudah meletakkan di beberapa titik yang banyak tumpukan sampah, namun beberapa tong sampah yang kita letakkan hilang, dan untuk memberikan tong sampah lagi kita harus mengajukan pengadaan tong sampah lagi dan itupun belum tentu diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Penanganan

Sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Yang juga menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman dan kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melakukan pengelolaan sampah secara sederhana sesuai dengan yang sudah disosialisasikan, ini salah satu factor yang membuat permasalahan sampah tidak pernah habis, karena dari masyarakatnya sendiri yang tidak ikut berpartisipasi untuk sama – sama menjaga lingkungan, karena walau bagaimanapun pihak dinas menyediakan sarana dan prasarana serta sosialisasi yang diberikan, tidak akan memberikan banyak manfaat apabila kesadaran dari masyarakatnya sendiri masih kurang dan itu hanya akan menjadi sia-sia. Salah satu contoh kurangnya kesadaran masyarakat ini bisa dilihat dari pembuangan sampah, beberapa masyarakat membuang sampah mereka di atas jam 09.00 pagi, sedangkan truk pengangkut sampah beroperasi mulai pukul 07.00 pagi dan pukul 09.00 truk sudah selesai berkeliling untuk mengangkut sampah sehingga pada saat pengangkutan pagi tidak begitu banyak sampah yang terangkut namun pada pengangkutan berikutnya sampah sudah banyak tertumpuk, jika masyarakat tepat waktu mengumpulkan sampahnya maka tumpukan sampah tidak akan terjadi”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Kebersihan,

beliau mengatakan :

“masyarakat kurang peduli terhadap sampah dipekarangan rumahnya sendiri yang membuat kami harus bekerja ekstra sedangkan pemilik rumah tidak mau peduli dengan lingkungannya sendiri”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, beliau mengatakan :

“masyarakat tidak mau diatur sehingga sulit mencari penyelesaian dari permasalahan sampah ini, karena bagaimanapun juga jika lingkungan kumuh yang pertama akan disalahkan adalah RT setempat bagaimana kepeduliannya terhadap warganya”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, beliau mengatakan :

“Minimnya tong sampah maupun TPS yang disediakan dan juga kurangnya jadwal pengangkutan sampah yang dimana hanya diangkut di pagi hari”.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan ada beberapa penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu :

1. Masih kurangnya kejujuran masyarakat untuk membayar retribusi sampah dan minimnya kepedulian masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan sosialisasi yang sudah diberikan termasuk dengan membuang sampah sesuai jadwalnya
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang dimana sangat diharapkan peran aktif dari setiap masyarakat untuk bekerjasama menjaga lingkungan.
5. Masih kurangnya fasilitas sarana-prasarana tong sampah, TPS, dan jadwal pengangkutan sampah yang hanya sekali sehari.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai output juga memiliki beberapa saran yang nantinya akan bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yang menjadi lokasi penelitian penulis kali ini. Berikut kesimpulan yang dihasilkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan menemukan bahwa Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah menyediakan sarpras pengelolaan sampah, melaksanakan tugas arahan, dan pengawasan terhadap tugas bawahan, serta menetapkan lokasi TPS/TPA. Pada pelaksanaannya dilapangan masih terdapat kendala dapat dilihat dari masih banyaknya tumpukan sampah yg tidak dibersihkan menyeluruh, kurangnya sarpras, serta tidak tetapnya jadwal pengambilan sampah yg disebabkan oleh tidak adanya TPS dan lahan TPA yg jauh, kurangnya Anggaran Dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi aturan dan menjaga lingkungan sekitarnya.
2. Dalam Pelaksanaan Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah masih terdapat hambatan – hambatan seperti kurangnya pengawasan, sanksi yang tegas, pembayaran rutin uang

retribusi sampah, tidak tepatnya jadwal masyarakat mengumpulkan sampah, serta beberapa dari sarana prasarana seperti tong sampah yang sering hilang dan yang paling utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk sama – sama melaksanakan pengelolaan sampah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran – saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintahan khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak – pihak di atas adalah :

1. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup agar lebih meneliti siapa-siapa saja masyarakat yang tidak mau membayar iuran retribusi sampah dan memberikan efek atau konsekuensi dari tindakannya tersebut yang tidak mau membayar rutin tagihan sampah dan masyarakat diharapkan amanah terhadap fasilitas sarana-prasarana yang sudah disediakan oleh DLH.
2. Kepada masyarakat diharapkan sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga mengikuti aturan agar membuang sampah sesuai jadwalnya sehingga sampah dapat diangkut dan tidak menumpuk.

3. Kepada masyarakat diharapkan juga agar lebih peka terhadap lingkungan tempat tinggal, seperti mengumpulkan sampah yang berserakan di sekitar halaman rumah untuk dimasukkan ke dalam tong sampah yang akan mempermudah petugas kebersihan dalam mengangkut sampah agar bersih menyeluruh.
4. Kepada masyarakat agar dapat mengikuti peraturan sehingga dinas terkait maupun ketua RT tidak kewalahan mengawasi masyarakatnya yang dimana tentunya akan memberikan efek baik bagi semua apabila masyarakat dapat mengikuti aturan.
5. Dinas Lingkungan Hidup agar dapat menggunakan anggaran dana semaksimal mungkin untuk pengelolaan sampah, agar terpenuhinya dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah akan lebih efektif dan juga dapat menambah waktu operasional pengangkutan sampah atau dengan pembagian shift bertugas, dan dapat dilaksanakan dengan tertib untuk pengangkutan sampah ke TPA, sehingga mengurangi terjadinya penumpukan sampah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Ardianto, Elvinaro. (2016). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*. Bandung: Simbiosis.
- Alwi, Syafarudin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Bahar, 1986. *Tentang karakteristik dan sumber sampah*; UNHAS Makassar
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chandra, budiman. 2007. *Pengantar kesehatan lingkungan*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Lexie M. Giroth, 2004, "Status dan Peran Pendidikan Pramong Praja Indonesia", CV Indra Prahasta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Talizi Duhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Ndraha, Talizi Duhu. 2005. *Kybernology : Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta

Poerwadarminta, W.J.S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Slamet, J. S. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press.

Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Persada

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Syafie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Gravindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Jurnal/Skripsi :

Amalia Amanda. 2019. *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Kemuning Kota Pontianak*. Administrasi Publik. FISIP UNTAN Pontianak

Ananda Rifqi Abdurrahman, Tri Yuniningsih, Maesaroh. 2015. *Analisis Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam Mewujudkan Sanitasi Perkotaan Pada Sektor Persampahan*. Administrasi Publik. FISIP UNDIP

Dewita Sari, Syafruddin Ritonga. 2016. *Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan*. Administrasi Publik. FISIP UMA

- Dwi Setyaningsih. 2017. *Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon*. Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang
- Ekky Ananta Sahara. 2013. *Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Kemiri Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*. Ilmu Administrasi Negara. FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur
- Elsi Sofiyah. 2018. *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan*. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi. UNILAK
- Juvinus Kobogau, Ismail Sumampouw, Neni Kumayas. 2018. *Kinerja Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Mimika*. Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 1 No. 1
- Natasya Lahindah, Marthen Kimbal, Trilke Tulung. 2017. *Peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado (Studi di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado)*. Ilmu Pemerintahan. FISIP UNSRAT
- Ni Putu Intan Cahayahati, I Gusti Ngurah Wairocana. 2019. *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Pangastulan*. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum. Universitas Udayana
- Purhayani, Any Siti, 2019. *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah : Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*
- Reza Mochammad Yanuar. 2016. *Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengolahan Sampah* . Ilmu Pemerintahan. FISIP UMY.
- Riska Libriyanti Mahayuning Tyas. 2013. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Peleburan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang)*. Ilmu Pemerintahan. FISIP UNDIP
- Sri Wahyuni, Gustaaf Budi Tampi, Rully Mambo. 2018. *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*. Administrasi Publik. FISIP UNSRAT
- Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado*. Ilmu Pemerintahan FISIP Vol. 3 No. 3

Peraturan Perundang-undangan :

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah